

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGANJALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN**
Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Cerry

NIM: 072114066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

Skripsi

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

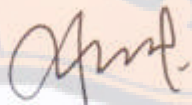
Oleh:

Cerry

NIM: 072114066

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA

Tanggal: 16 Juni 2011

Skripsi

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Cerry

NIM : 072114066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Juli 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Sekretaris Josephine Wuri, S.E., M.Si

Anggota A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA

Anggota Drs. Yusef Widya Karsana Akt., M.Si

Anggota Josephine Wuri, S.E., M.Si

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Think positive for positive life



Kupersembahkan untuk;

Tuhan Yesus Kristus Pelindungku

Papa dan Mendiang Mama

Seluruh Keluarga yang selalu mendukung

Hunykuw yang selalu menemani

Terimakasih untuk semua doa dan cinta yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 19 Juli 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudia terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh univesitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Juli 2010
Yang membuat pernyataan,

Cerry

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Cerry
NIM : 072114066

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dengan Jumlah Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 29 Juli 2011

Yang Menyatakan:



Cerry

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGANJALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Skripsi ini sudah pasti tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt, QIA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

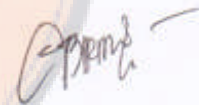
- d. Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
- f. Bapak dan Ibu selaku staff Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- g. Bapak dan Ibu selaku staff Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
- h. Papa dan Mendiang Mama tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada saya.
- i. Seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan semangat buat saya (Moi ce, ko Jihiung, ce Elina, ce Corry, ce Jeni, ko John, ko Nael dan Susi).
- j. Buat Sr Ben selaku ibu Asrama yang telah banyak membantu lewat doa.
- k. Buat hunykuw, atas doa, dukungan, cinta dan kasih sayang selama ini dalam menyelesaikan semuanya.
- l. Buat teman-teman Asrama, Anita, Maya, Tya, Tiagita, Icol, Conchita, Evi, Lala, Jojo, Jeje, Dayana, Dian, Die, Nora, dan Qnha. Makasi udah menjadi temen yang baik dalam keseharianku.
- m. Teman-teman maem soto Bunda, Cino Febri, Mela, Monik. Kangen maem soto lagi ma kalian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- n. Buat teman-teman MPT, Cino Tepi, Erwin, Yustina, Nidya, Fury, dan Novi. Makasi atas semangat kalian yang memotivasi saya.
- o. Buat teman-teman IKNA, Ai, Dona, Om Bruno, Fata Serdadu, Agus Pakno, Brother Melki, Putri, Itin, Kity, Mike, Urry, dan Essa. Makasi sudah mau menerima saya sebagai saudara.
- p. Buat temen-temen El-Asah, Ayu dan Andro (mau luangkan waktu nemenin saya ujian..hehehe), Ade Julia, Benny, Tante Younie dan Om Aris.
- q. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2011



Cerry

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

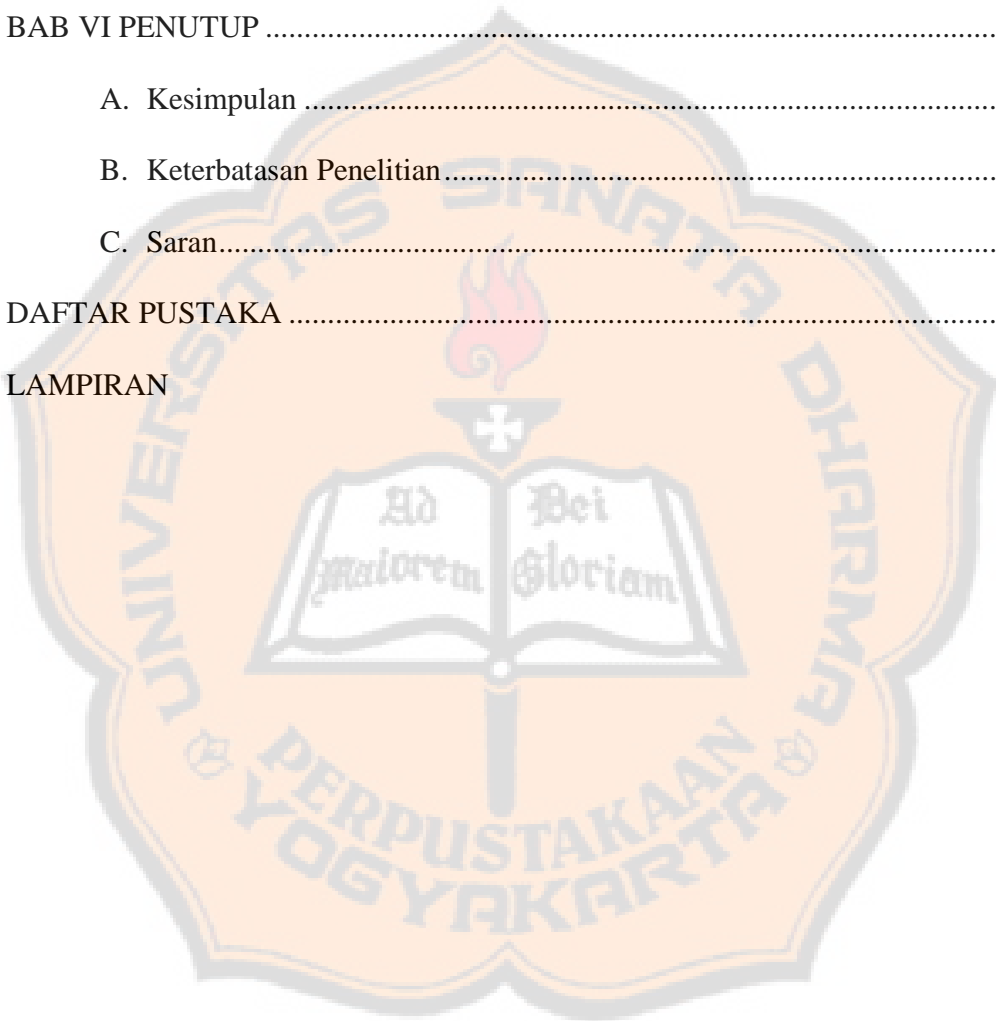
	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PENYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Keuangan Daerah.....	7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pendapatan Asli Daerah.....	9
C. Pajak	10
D. Pajak Daerah.....	17
E. Pajak Penerangan Jalan	19
F. Pengertian Kontribusi.....	21
G. Hipotesis	22
H. Hasil Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis, Subjek dan Objek Penelitian.....	25
B. Teknik Pengumpulan Data	26
C. Variabel Penelitian	26
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	31
A. Sejarah Kota Yogyakarta.....	31
B. Pemerintahan	35
C. Keadaan Geografis	38
D. Keadaan Penduduk	39
E. Tenaga Kerja.....	40
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	43

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan	
Jalan dengan Jumlah Penerangan Jalan	47
D. Pembahasan	57
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Keterbatasan Penelitian	70
C. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana tabel kontribusi PPJ terhadap PAD	27
Tabel 2. Rencana tabel hubungan Penerimaan PPJ dengan jumlah penerangan jalan	28
Tabel 3. Rencana tabel rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah penerangan jalan.....	29
Tabel 4. Tabel Kecamatan dan Keseluruhan Kota Yogyakarta	37
Tabel 5. Tabel Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin	40
Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2000-2009	42
Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2000-2009	43
Tabel 8. Jumlah Penerangan Jalan Umum tahun 2000-2009	43
Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2000-2009.....	47
Tabel 10. Penerimaan pajak penerangan jalan dan jumlah lampu penerangan jalan umum dan lampu hias	48
Tabel 11. Rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan umum dan lampu hias	49
Tabel 12. Rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan lampu penerangan jalan umum.....	51
Tabel 13. Rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan lampu hias.....	54
Tabel 14. Rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH penerangan jalan umum	56

ABSTRAK

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGANJALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN**

Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Cerry

NIM: 072114066

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan yang ada di kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis hubungan yang menggunakan korelasi spearman rank.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2000 adalah sebesar 12,37%, tahun 2001 sebesar 19,31%, tahun 2002 sebesar 18,38%, tahun 2003 sebesar 17,20%, tahun 2004 sebesar 17,74%, tahun 2005 sebesar 17,00%, tahun 2006 sebesar 17, 51%, tahun 2007 sebesar 16,55%, tahun 2008 sebesar 13,49%, dan pada tahun 2009 sebesar 12,22%. Sedangkan (2) hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan adalah sebesar 0,987, yang berarti antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan mempunyai hubungan positif kuat. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU) adalah sebesar 0,981, yang berarti antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan jalan umum mempunyai hubungan positif kuat. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias adalah sebesar 0,975, yang berarti antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias mempunyai hubungan positif kuat. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan KWH penerangan jalan adalah sebesar -0,27, yang berarti antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan KWH penerangan jalan mempunyai hubungan negatif lemah.

ABSTRACT

**STREET-LIGHTING TAX REVENUE CONTRIBUTION TO REGIONAL
REVENUE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN STREET-LIGHTING
TAX REVENUE AND THE NUMBER OF STREET LIGHTS.**

(A Case Study In Yogyakarta Municipality Government)

Cerry

Student Number : 072114066

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The objective of this research was to find out the amount of street-lighting tax contribution to regional revenue and examine the relationship between street-lighting tax revenue and the number of street lights in Yogyakarta municipality.

This research was case study. The data were obtained from interview and documentation. The data analysis techniques used were contribution analysis and relationship analysis using Spearman's rank correlation.

The result of data analysis showed that (1) street-lighting tax contribution to regional revenue in the year 2000 was 12.37%, 2001 was 19.31%, 2002 was 18.38%, 2003 was 17.20%, 2004 was 17.74%, 2005 was 17.00%, 2006 was 17.51%, 2007 was 16.55%, 2008 was 13.49%, and 2009 was 12.22%. While (2) the relationship between street-lighting tax revenue and the number of street lights was 0.987, meaning that there was a strong positive relationship between street-lighting tax revenue and the number of street lights. The relationship between street-lighting tax revenue and public street lights was 0.981, meaning that there was a strong positive relationship between street-lighting tax revenue and public street lights. The relationship between street-lighting tax revenue and the number of decorative street lights was 0.975, meaning that there was a strong positive relationship between street-lighting tax revenue and the number of decorative street lights. The relationship between street-lighting tax revenue and street lights KWH was -0.27, meaning that there was a weak negative relationship between street-lighting tax revenue and street lights KWH.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap daerah di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan pembangunan daerah di setiap daerah berbeda-beda, perkembangan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, adat istiadat, sifat masyarakat dan pemerintah pada daerah tersebut. Perkembangan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan pelayanan masyarakat seperti meningkatkan fasilitas pelayanan umum di berbagai daerah. Dengan adanya peningkatan fasilitas pelayanan umum, maka pemerintah juga akan melakukan pungutan iuran yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan umum. Iuran yang dibebankan kepada masyarakat ini biasanya dapat berupa pajak dan retribusi. Iuran ini yang akan menjadi pendapatan bagi pemerintah atau biasa disebut pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah yang paling berpotensi cukup tinggi adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pendapatan asli daerah adalah sektor pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah/kota. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan tenaga listrik atau pengguna tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Masyarakat di kota-kota besar sangat bergantung dengan penerangan jalan yang ada di setiap ruas jalan kota. Seperti di kota Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai kota pendidikan dan pariwisata, fungsi penerangan jalan bukan hanya sebagai penerangan kota saja tetapi juga sebagai sarana untuk mempercantik kota pada malam hari. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota

Yogyakarta untuk dapat mendukung predikat tersebut telah melaksanakan peningkatan infrastruktur, baik melalui pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan. Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan infrastruktur di Kota Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah 32,5 km² yang terbagi dalam 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan yang mempunyai 467 ruas jalan dengan panjang 441.231 km terlihat dari jumlah penerangan jalan yang bertambah setiap tahun. Dari tahun 2005 jumlah penerangan jalan utama sebanyak 7500 titik, pada tahun 2006 bertambah menjadi 7.625 titik, sedangkan pada tahun 2008 bertambah menjadi 8.028 titik. Data ini menunjukkan bahwa penerangan jalan umum di kota Yogyakarta setiap tahun bertambah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melihat bagaimana hubungan antara besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan.

Dengan melihat salah satu misi pembangunan kota Yogyakarta, yang ingin menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, maka sektor penerangan jalan merupakan salah satu sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan penerangan jalan yang terang di malam hari maka dapat memperindah kota dan dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sumber dana yang digunakan untuk penerangan berasal

dari penerimaan pajak penerangan jalan oleh sebab itu perlu dilihat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu perlu juga dilihat bagaimana hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009?
2. Apakah terdapat hubungan antara besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009?

C. BATASAN MASALAH

Penelitian ini hanya akan membahas besarnya kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan hubungan antara besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan sehingga tidak dibahas sumber pendapatan daerah yang lain.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Yogyakarta dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara besarnya penerimaan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerangan jalan di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat bagi Penulis:

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan semakin mengerti mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam bidang penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hubungan antara besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap jumlah Penerangan Jalan.

Manfaat bagi Universitas:

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat memberikan sumbangan ilmu tentang Akuntansi Sektor Publik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi: pengertian pendapatan daerah, pengertian

pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, pengertian pajak penerangan jalan dan teori-teori yang mendukung pajak penerangan jalan.

Bab III Metoda Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum

Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum tempat penelitian.

Bab V Deskripsi data, Analisa data dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data dan perhitungan rasio kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan analisis korelasi antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah Negara sebagian kekuasaan Presiden juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam UU No 17/2003 pasal 6 yang dikutip oleh Renyowijoyo (2008: 58):

- a. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD.
- b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Menurut Renyowijoyo (2008:58) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Menurut Renyowijoyo (2008:58) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Anggaran yang disusun dan dikelola oleh pemerintah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD disusun

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahsun (2006:39) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro

3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Wulansari (2008:11) definisi pajak adalah:

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro,SH definisi pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak yang dapat dirumuskan berdasarkan pengertian diatas adalah:

- a. Pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah
- b. Wajib dilaksanakan
- c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku

- d. Tujuan dari pengalihan ini agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
- e. Iuran rakyat ke kas Negara yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku
- f. Bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbale balik yang langsung
- g. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono (2004:6) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono (2004:7-8)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya.

4. Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono (2004:10-11)

Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya:

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyek, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
 5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono (2004:8):
 - a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
 - b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
 - c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
1. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 2. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk Negara.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono (2004:11)

Pemungut pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel Nyata, (*Riil Stelsel*) yaitu pengenaan pajak berdasarkan obyek (penghasilan yang nyata).
- b. Stelsel Anggapan, (*Fictieve stelsel*) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

7. Asas Pemungutan Pajak ada tiga, yaitu:

1. Asas domisili (Asas tempat tinggal) yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas Sumber, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

8. Sistem Pemungutan Pajak ada 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang system wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 No. 6 pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota (menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Suhartono(2004:13))

2. Prinsip-Prinsip Perpajakan Daerah

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Suhartono (2004:14) prinsip-prinsip Perpajakan Daerah adalah:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup elastic, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan horizontal artinya berlaku samabagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 No.1, Jenis-jenis Pajak Daerah adalah:

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak Propinsi terdiri dari:

- 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Parkir
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

E. Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 126-127), Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 127), Subjek dan wajib Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- b. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 127), Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait
 - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah
- ### 4. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran atau tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang dimiliki sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
5. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 % (delapan persen);
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 4 % (empat persen);
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, sebesar 4 % (empat persen).

F. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang disebut kontribusi pajak penerangan jalan adalah sumbangan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada suatu periode. Tetapi

selain kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, ada juga kontribusi lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

G. Hipotesis

Salah satu teori yang mendukung pemungutan pajak adalah teori asuransi. Dalam teori ini disebutkan bahwa Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena masyarakat akan memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pemungutan pajak penerangan jalan, dimana masyarakat membayarkan pajak penerangan jalan melalui pembayaran listrik. Sesuai dengan teori asuransi, pajak penerangan jalan yang dikumpulkan ini selanjutnya digunakan untuk melindungi rakyat dengan memberikan penerangan jalan yang baik. Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Suhartono (2004) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Dana Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman tahun 1999-2003”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan Umum mempunyai hubungan positif dengan dana penerangan jalan

umum. Artinya bila Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula kenaikan pada dana penerangan jalan.

Riduansyah (2003) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.” Hasil penelitian menunjukkan Total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun tahun 1993/1994-2000 berkisar antara 7,07% -8,79% dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,81%. Dan pertumbuhannya sebesar 22,89%. Dari data yang di peroleh terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan perundang-undangan dalam kurun waktu anggaran1993/1994-2000. Dan untuk melaksanakan otonomi daerah kiranya pemerintah Bogor perlu melihat peluang yang ada.

Wulansari (2008) melakukan penelitian dengan judul “ Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara 7,59% - 11,09%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar 9,383%.

Sasmira (2007) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Riau”. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami fluktuasi yaitu dari tahun anggaran 2001/2002 mengalami penurunan, selanjutnya mengalami kenaikan, pada tahun 2004/2005 mengalami penurunan. Selain itu pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005 selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi berupa kenaikan dan penurunan yaitu tahun 2001/2002 mengalami kenaikan, tahun 2003 mengalami penurunan, tahun 2004 kembali mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2005 kembali mengalami penurunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada sebuah instansi pemerintah yaitu penelitian terhadap pajak penerangan jalan umum yang diterima oleh Pemerintah. Subyek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. Tempat penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2011.

Obyek dari penelitian ini adalah:

1. Data pajak penerangan jalan umum yang diterima oleh pemerintah.
2. Data realisasi pajak penerangan jalan tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
3. Data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
4. Data jumlah penerangan jalan (LPJU dan lampu hias) yang terdapat di Kota Yogyakarta dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
5. Data besarnya KWH penerangan jalan yang terdapat di Kota Yogyakarta dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan atau instansi pemerintah. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penerangan Jalan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah, penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh pemerintah dan data jumlah penerangan jalan yang ada di Yogyakarta.

C. Variabel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, variabel penelitian yang digunakan adalah:

1. Penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Pendapatan asli daerah.
3. Jumlah penerangan jalan, yang meliputi total penerangan jalan, jumlah lampu penerangan jalan, jumlah lampu hias dan KWH penerangan jalan.

D. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun, rumus yang digunakan (Halim 2002:345), adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kontribusi PPJ terhadap PAD

Tahun Anggaran	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			

2. Sebelum mengetahui apakah ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan maka kita akan melihat penerimaan pajak penerangan jalan dan jumlah penerangan jalan yang terdapat di Kota Yogyakarta selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 yang terdapat dalam rencana tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah Penerangan Jalan.

Tahun	PPJ	Jumlah Penerangan Jalan			
		Total Penerangan Jalan	LPJU	Lampu Hias	KWH
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					

Untuk mengetahui hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Jumlah Penerangan Jalan maka digunakan rumus (Santoso 2010:240):

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

r_s = Koefisien korelasi Spearman Rank

n= jumlah data

Selanjutnya data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Jumlah Penerangan jalan di ranking berdasarkan data yang paling besar, tabel ranking yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rencana tabel rangking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
dengan Jumlah Penerangan Jalan.

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah Penerangan Jalan	Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Ranking Jumlah Penerangan Jalan	D (Selisih)	D^2
2000						
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
Total						

Langkah-langkah uji signifikansi untuk kedua variabel tersebut:

1. Hipotesis:

H_0 : Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

H_1 : Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

Dasar pengambilan keputusan

a. Dengan membandingkan z hitung dengan z tabel:

Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 diterima.

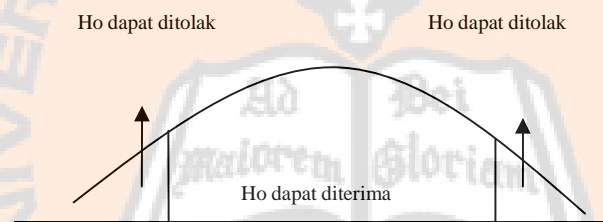
Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 ditolak.

2. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Jika angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan. Sedangkan angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

a. Kriteria pengujian



b. Kesimpulan

Jika H_0 diterima maka tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

Jika H_0 ditolak maka ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1755, berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi perjanjian Gianti adalah Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede, dan ditambah daerah Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobongan.

Setelah perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi

ibukota dan pusat pemerintahan ini adalah hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, dan disana terdapat pesanggrahan yang dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat untuk membabad hutan tadi untuk dijadikan kraton.

Sebelum Kraton jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pesanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang sedang dibangun juga. Sultan Hamengku Buwono I resmi menempati pesanggrahan Ambarketawang pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya adalah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII

menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1947, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja dan Kota Otonomi. Dalam pasal 1 UU nomor 17 tersebut menyatakan bahwa kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari kabupaten Bantul yang sekarang

menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Walikota pertama kota Yogyakarta dijabat oleh Ir. Moh Enoh. Pada masa jabatannya Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah Yogyakarta masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum lepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II seperti lain. Setelah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

B. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil walikota.

2. Pembagian Wilayah

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara: Sleman.
2. Sebelah selatan: Bantul.
3. Sebelah Barat: Sleman dan Bantul.
4. Sebelah timur: Sleman dan Bantul.

Selain itu Kota Yogyakarta terdiri dari 614 Rukun Warga dan 2,523 Rukun Tetangga. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan yaitu sebesar 2,106,338 hektar dan bagian terkecil merupakan lahan kosong yaitu sebesar 20,041 hektar. Wilayah yang paling luas adalah kecamatan Umbulharjo sebesar 812,00 Ha, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha (1,9%). Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kraton	Patihan	0,40	10	44
		Panembahan	0,66	18	78
		Kadipaten	0,34	15	53
			1,40	43	175
2.	Matrijeron	Gedungkiwo	0,90	18	86
		Suryodiningratan	0,85	17	69
		Matrijeron	0,86	20	75
			2,61	55	230
3.	Umbulharjo	Giwangan	1,26	13	42
		Sorosutan	1,68	16	63
		Pandayan	1,38	12	46
		Warungboto	0,83	9	38
		Tahunan	0,78	11	48
		Muja Muju	1,53	12	55
		Semaki	0,66	10	34
			8,12	83	326
4.	Mergangsan	Brontokusuman	0,93	23	83
		Keparakan	0,53	13	57
		Wirogunan	0,85	24	76
			2,31	60	216
5.	Danurejan	Suryatmajan	0,28	15	45
		Tegal Panggung	0,35	16	66
		Bausasran	0,47	12	49
			1,10	43	160
6.	Pakualaman	Purwokinanti	0,33	10	47
		Gunung Ketur	0,30	9	36
			0,63	19	83
7.	Kotagede	Prenggan	0,99	13	57
		Purayan	0,83	14	58
		Rejowinangun	1,25	13	49
			3,07	40	164
8.	Gondomanan	Prawirotaman	0,45	18	61
		Ngupasan	0,67	13	49
			1,12	21	110
9.	Gondokusuman	Baciro	1,06	21	88
		Demangan	0,74	12	44
		Kliteran	0,68	16	63
		Kotabaru	0,71	4	21

		Terban	0,80 3,99	12 83	59 275
10.	Ngampilan	Notoprajan Ngampilan	0,37 0,45 0,82	8 13 21	50 70 120
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan Wirobrajan Pakuncen	0,44 0,67 0,65 1,76	10 12 12 34	51 58 56 165
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman Sosromenduran	0,50 0,46 0,96	23 14 37	89 55 144
13.	Jetis	Bumijo Gowongan Cokrodiningratan	0,58 0,46 0,66 1,70	13 13 11 37	55 52 60 167
14.	Tegalrejo	Tegalrejo Bener Kricak Karangwaru	0,82 0,57 0,82 0,70 2,91	12 7 13 14 46	46 25 61 56 186
	Jumlah	45	32,5	614	2.523

Sumber: BPS kota Yogyakarta

C. Keadaan Geografis

1. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat 3 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta yaitu:

- Sebelah timur : Sungai Gajah Wong.
- Sebelah tengah : Sungai Code.
- Sebelah selatan : Sungai Winongo.

2. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km^2 yang berarti 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada di dataran lereng gunung Merapi yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah Vulkanis Muda.

4. Iklim

Curah hujan rata-rata 2.012 mm/tahun dengan 119 hari hujan. Suhu rata-rata 27,2°C dan kelembapan rata-rata 24,7 %. Angin pada umumnya bertiup Angin Muson dan pada musim hujan bertiup Angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin Muson Tenggara yang agak kering dengan arah \pm 90°-140° dengan rata-rata kecepatan 515.

D. Keadaan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah sebesar 456.915 orang, terdiri dari 220.395 orang laki-laki dan 230.723 orang perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah

48,85 % laki-laki dan 51,15% perempuan. Secara keseluruhan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dengan luas wilayah 32,50 Km^2 , kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 13.881 jiwa per Km^2 .

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Kraton	22.520	10.612	11.907
2.	Mantrijeron	37.442	18.398	19.044
3.	Umbulharjo	79.320	39.191	40.129
4.	Mergangsan	35.921	17.352	18.569
5.	Danurejan	15.803	7.398	8.595
6.	Pakualaman	11.768	10.999	11.683
7.	Kotagede	32.304	16.097	16.207
8.	Gondomanan	15.993	5.754	6.014
9.	Gondokusuman	55.710	27.062	28.648
10.	Ngampilan	20.232	9.537	10.695
11.	Wirobrajan	31.104	15.856	15.248
12.	Gedongtengen	20.422	9.708	10.714
13.	Jetis	30.461	15.019	15.442
14.	Tegalrejo	41.036	20.224	20.792
	Jumlah	456.915	223.227	233.688

Sumber: BPS kota Yogyakarta

E. Tenaga kerja

Mata pencaharian penduduk rata-rata di sektor jasa dan industri yang erat kaitannya dengan fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Wisata di Indonesia.

Jumlah pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran tahun 2008 sebanyak 10.988 orang yang terdiri dari 6.756 laki-laki dan 5.232

perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut mempunyai gelar sarjana yaitu sebesar 85,06 %, selain itu yang berpendidikan SMU 12,87%, Diploma 1,79% dan sisanya adalah S2, SMP dan SD.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan yang ada di Kota Yogyakarta. Data yang diperlukan adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2000-2009, realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2000-2009, dan jumlah lampu penerangan jalan 2000-2009. Data-data tersebut di dapat dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2000-2009

Tahun	Realisasi PAD
2000	22,452,952,251
2001	40,352,592,890
2002	56,377,459,399
2003	68,621,564,311
2004	79,911,419,101
2005	89,196,416,785
2006	96,419,456,305
2007	114,098,350,942
2008	132,431,571,515
2009	161,473,838,210

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009

TAHUN	REALISASI
2000	2,777,044,366
2001	7,793,350,928
2002	10,364,342,556
2003	11,809,188,645
2004	14,176,664,924
2005	15,159,696,951
2006	16,882,280,805
2007	18,885,554,284
2008	17,864,484,847
2009	19,736,631,310

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 8. Jumlah Penerangan Jalan Umum Tahun 2000-2009

TAHUN	Penerangan Jalan Umum			
	Total PJU	LPJU	Lampu Hias	KWH
2000	6,418	6,418	0	11,440,414
2001	6,418	6,418	0	10,523,411
2002	7,734	7,734	0	9,125,810
2003	7,984	7,734	250	7,101,336
2004	13,233	12,983	250	9,164,761
2005	13,715	13,465	250	9,691,902
2006	15,151	14,716	435	8,713,694
2007	17,378	16,645	733	9,084,299
2008	18,722	18,000	722	10,353,533
2009	19,218	18,430	788	9,742,733

Sumber: Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{PPJ}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

PPJ: Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

PAD: Realisasi Penerimaan PAD

Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah:

1. Untuk Tahun 2000

$$= \frac{2.777.044.366}{22.452.952.251} \times 100\% = 12,37\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2000 adalah sebesar 12,37%

2. Untuk Tahun 2001

$$= \frac{7.793.350.928}{40.352.592.890} \times 100\% = 19,31\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2001 adalah sebesar 19,31%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 6,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Untuk Tahun 2002

$$= \frac{10.364.342.556}{56.377.459.399} \times 100\% = 18,38\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2002 adalah sebesar 18,38%. Kontribusi penerimaan pajak

penerangan jalan tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Untuk Tahun 2003

$$= \frac{11.809.188.645}{68.621.564.311} \times 100\% = 17,20\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2003 adalah sebesar 17,20%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Untuk Tahun 2004

$$= \frac{14.176.664.924}{79.911.419.101} \times 100\% = 17,74\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2004 adalah sebesar 17,74%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Untuk Tahun 2005

$$= \frac{15.159.696.951}{89.196.416.785} \times 100\% = 17,00\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2005 adalah sebesar 17,00%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Untuk Tahun 2006

$$= \frac{16.882.280.805}{96.419.456.305} \times 100\% = 17,51\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2006 adalah sebesar 17,51%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

8. Untuk Tahun 2007

$$= \frac{18.885.554.284}{114.098.350.942} \times 100\% = 16,55\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2007 adalah sebesar 16,55%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

9. Untuk Tahun 2008

$$= \frac{17.864.484.847}{132.431.571.515} \times 100\% = 13,49\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008 adalah sebesar 13,49%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 3,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Untuk Tahun 2009

$$= \frac{19.736.631.310}{161.473.838.210} \times 100\% = 12,22\%$$

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009 adalah sebesar 12,22%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009.

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2000	2,777,044,366	22,452,952,251	12,37
2001	7,793,350,928	40,352,592,890	19,31
2002	10,364,342,556	56,377,459,399	18,38
2003	11,809,188,645	68,621,564,311	17,20
2004	14,176,664,924	79,911,419,101	17,74
2005	15,159,696,951	89,196,416,785	17,00
2006	16,882,280,805	96,419,456,305	17,51
2007	18,885,554,284	114,098,350,942	16,55
2008	17,864,484,847	132,431,571,515	13,49
2009	19,736,631,310	161,473,838,210	12,22
Rata-rata			16,177

Sumber: Data diolah

C. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Penerangan Jalan.

Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan ini dibagi menjadi 4(empat) bagian, yaitu:

1. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan total penerangan jalan (lampu penerangan jalan umum dan lampu hias).
2. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan jalan umum.
3. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu hias.
4. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan dengan KWH penerangan jalan umum.

Sebelum melihat semua variabel tersebut, berikut ini tabel dari setiap variabel tersebut:

Tabel 10.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias.

Tahun	Pajak Penerangan Jalan	LPJU	Lampu Hias	Total	KWH
2000	2,777,044,366	6,418	0	6,418	11,440,414
2001	7,793,350,928	6,418	0	6,418	10,523,411
2002	10,364,342,556	7,734	0	7,734	9,125,810
2003	11,809,188,645	7,734	250	7,984	7,101,336
2004	14,176,664,924	12,983	250	13,233	9,164,761
2005	15,159,696,951	13,465	250	13,715	9,691,902
2006	16,882,280,805	14,716	435	15,151	8,713,694
2007	18,885,554,284	16,645	733	17,378	9,084,299
2008	17,864,484,847	18,000	722	18,722	10,353,533
2009	19,736,631,310	18,430	788	19,218	9,742,733

Sumber: Data diolah

Sebelum melihat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu penerangan jalan umum dan lampu hias maka kedua variabel ini di ranking berdasarkan data yang paling besar seperti pada tabel berikut:

Tabel 11.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias.

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Total Penerangan Jalan	Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Ranking Jumlah Penerangan Jalan	D	D^2
2000	2,777,044,366	6,418	10	9,5	0,5	0
2001	7,793,350,928	6,418	9	9,5	-0,5	0
2002	10,364,342,556	7,734	8	8	0	0
2003	11,809,188,645	7,984	7	7	0	0
2004	14,176,664,924	13,233	6	6	0	0
2005	15,159,696,951	13,715	5	5	0	0
2006	16,882,280,805	15,151	4	4	0	0
2007	18,885,554,284	17,378	2	3	-1	1
2008	17,864,484,847	18,722	3	2	1	1
2009	19,736,631,310	19,218	1	1	0	0
Jumlah					0	2

Sumber: Data diolah

Penyelesaiannya:

Karena variabel y (jumlah penerangan jalan), ada angka atau ranking yang sama yaitu ranking 9,5 ada 2 buah, berarti $t=2$. Angka t adalah jumlah angka atau ranking yang sama, maka penyelesaiannya adalah:

$$\sum r_{xy} = \frac{2^3 - 2}{12} = 0,5$$

Menghitung $\sum x^2$ dan $\sum y^2$;

$$\sum x^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 0 = 82,5$$

$$\sum y^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 0,16 = 82$$

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

$$r_s = \frac{82,5 + 82 - 2}{2\sqrt{82,5 \cdot 82}} = 0,987$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,987.

Untuk melihat keamatan hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan maka perlu dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah penerangan jalan.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 12.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum.

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan	Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Ranking Jumlah Penerangan Jalan	D (Selisih)	D^2
2000	2,777,044,366	6,418	10	9,5	0,5	0,25
2001	7,793,350,928	6,418	9	9,5	-0,5	0,25
2002	10,364,342,556	7,734	8	7,5	0,5	0,25
2003	11,809,188,645	7,734	7	7,5	-0,5	0,25
2004	14,176,664,924	12,983	6	6	0	0
2005	15,159,696,951	13,465	5	5	0	0
2006	16,882,280,805	14,716	4	4	0	0
2007	18,885,554,284	16,645	2	3	-1	1
2008	17,864,484,847	18,000	3	2	1	1
2009	19,736,631,310	18,430	1	1	0	0
Jumlah					0	3

Sumber: Data diolah

Karena variabel y (lampu penerangan jalan), ada angka atau ranking yang sama yaitu rangking 9,5 ada 2 buah, berarti $t=2$ dan rangking 7,5 ada 2 buah, berarti $t=2$, maka penyelesaiannya adalah:

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} = 0,10$$

Menghitung $\sum x^2$ dan $\sum y^2$;

$$\sum x^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 0 = 82,5$$

$$\sum y^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 0,10 = 82,4$$

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

$$r_s = \frac{82,5 + 82,4 - 3}{2\sqrt{82,5 \cdot 82,4}} = 0,981$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,98.

Untuk melihat keeratan hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan lampu penerangan jalan umum maka perlu dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah LPJU.

Hi: Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah LPJU.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas $> 0,05$ maka Ho diterima.

Probabilitas $< 0,05$ maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah

$< 0,05$ maka Ho ditolak.

Tabel 13. Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Hias.

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Lampu Hias	Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Ranking Lampu Hias	D (Selisih)	D ²
2000	2,777,044,366	0	10	9	1	1
2001	7,793,350,928	0	9	9	0	0
2002	10,364,342,556	0	8	9	-1	1
2003	11,809,188,645	250	7	6	1	1
2004	14,176,664,924	250	6	6	0	0
2005	15,159,696,951	250	5	6	-1	1
2006	16,882,280,805	435	4	4	0	0
2007	18,885,554,284	733	2	2	0	0
2008	17,864,484,847	722	3	3	0	0
2009	19,736,631,310	788	1	1	0	0
Jumlah					0	4

Sumber: Data diolah

$$\sum Ty = \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} = 4$$

Menghitung $\sum x^2$ dan $\sum y^2$;

$$\sum x^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 0 = 82,5$$

$$\sum y^2 = \frac{10^3 - 10}{12} - 4 = 78,5$$

Dengan demikian didapat Korelasi Spearman:

$$r_s = \frac{82,5 + 78,5 - 4}{2\sqrt{82,5 \cdot 78,5}} = 0,975$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,975.

Untuk melihat keeratan hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias maka perlu dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

H_0 : Tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias.

H_1 : Ada hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah lampu hias.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,000 yang adalah

$< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 14.

Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan Umum.

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	KWH PJU	Ranking Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Ranking KWH PJU	D (Selisih)	D ²
2000	2,777,044,366	11,440,414	10	1	9	81
2001	7,793,350,928	10,523,411	9	2	7	49
2002	10,364,342,556	9,125,810	8	7	1	1
2003	11,809,188,645	7,101,336	7	10	-3	9
2004	14,176,664,924	9,164,761	6	6	0	0
2005	15,159,696,951	9,691,902	5	5	0	0
2006	16,882,280,805	8,713,694	4	9	-5	25
2007	18,885,554,284	9,084,299	2	8	-6	36
2008	17,864,484,847	10,353,533	3	3	0	0
2009	19,736,631,310	9,742,733	1	4	-3	9
Jumlah					0	210

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}
 r_{\text{rank}} &= 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{6(81 + 49 + 1 + 9 + 0 + 0 + 25 + 36 + 0 + 9)}{10(10^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{6(210)}{10(99)} \\
 &= -0,27
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = -0,27.

Untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan maka perlu dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel, seperti dibawah ini:

a. Hipotesis

Ho: Tidak ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan.

Hi: Ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan.

b. Dasar pengambilan keputusan

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas $> 0,05$ maka Ho diterima.

Probabilitas $< 0,05$ maka Ho ditolak.

c. Keputusan

Dengan melihat angka probabilitas:

Karena angka pada bagian SIG (2-TAILED) adalah 0,244 yang adalah $> 0,05$ maka Ho diterima.

D. PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2009 berkisar antara 12,22 %-19,31% yang

mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan untuk realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2000 sampai tahun 2009 selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2000 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,37% . Pada tahun 2001 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu sebesar 19,31%. Hal ini disebabkan oleh realisasi Pajak Penerangan Jalan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang meningkat. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh tiga komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat yaitu pajak daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan.

Pada tahun 2002 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,93% menjadi 18,38%. Hal ini disebabkan karena besarnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan besarnya kenaikan Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan kontribusi menjadi turun. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah meningkat cukup tinggi.

Untuk pada tahun 2003 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 17,20%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi seperti pada tahun 2002 yang mengakibatkan kontribusi menjadi turun. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah meningkat cukup tinggi.

Di tahun 2004 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,54% menjadi 17,74%. Penyebab kenaikan kontribusi ini yaitu adanya kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kenaikan empat komponen Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pada tahun 2005 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,74% menjadi 17,00%. Penyebab penurunan kontribusi ini disebabkan oleh besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan besarnya kenaikan Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan kontribusi mengalami penurunan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh tiga komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan retribusi daerah sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan.

Untuk tahun 2006 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi 17,51% . Kenaikan kontribusi ini disebabkan oleh kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diimbangi juga dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kenaikan tiga komponen Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi yaitu retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sedangkan pajak daerah mengalami penurunan.

Pada tahun 2007 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena empat komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Di tahun 2008 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi

dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh tiga komponen mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan.

Dan untuk tahun 2009 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena besarnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh tiga komponen mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah yang dipisahkan mengalami penurunan.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah 16,177%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2001 sebesar 19,31%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 12,22%. Dengan demikian Pajak Penerangan Jalan yang dipungut Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Penerangan Jalan.

a. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan (LPJU dan Lampu hias)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula pada Jumlah Penerangan Jalan. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan yaitu sebesar $(r)=0,987$ artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan positif yang kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan total Penerangan Jalan dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka probabilitas sebesar 0,000 yang < dari *level of* signifikansinya yaitu 0,01 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan besarnya total

Penerangan Jalan, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Pemerintah Kota dari masyarakat salah satunya digunakan untuk membiayai penambahan total jumlah lampu penerangan jalan. Hal bisa terlihat dari peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu diikuti peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan. Misalnya pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 17,864,484,847 meningkat menjadi Rp. 19,736,631,310 pada tahun 2009. Hal ini diikuti juga dengan peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan, pada tahun 2008 18,722 menjadi 19,218 pada tahun 2009.

b. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum.

Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula pada Lampu Penerangan Jalan Umum. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum yaitu sebesar $(r)=0,981$ artinya

hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum positif yang sangat kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka probabilitas sebesar 0,000 yang $<$ dari *level of* signifikansi yaitu 0,01 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan besarnya Lampu Penerangan Jalan Umum, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Pemerintah Kota dari masyarakat salah satunya digunakan untuk membiayai penambahan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum. Hal bisa terlihat dari peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu diikuti peningkatan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum. Misalnya pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 17,864,484,847 meningkat menjadi Rp. 19,736,631,310 pada tahun 2009. Hal ini diikuti juga dengan peningkatan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum, pada tahun 2008 18,000 menjadi 18,430 pada tahun 2009.

c. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias mempunyai hubungan yang positif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka akan terjadi pula pada Jumlah Lampu Hias. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias yaitu sebesar $(r)=0,975$ artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias positif yang kuat.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang positif kuat, maka untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias dilakukan uji signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka probabilitas sebesar 0,000 yang < dari *level of* signifikansi yaitu 0,01 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempunyai hubungan dengan besarnya Jumlah Lampu Hias, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Pemerintah Kota dari masyarakat salah satunya juga digunakan untuk membiayai penambahan lampu hias. Hal bisa terlihat dari peningkatan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang selalu diikuti peningkatan jumlah lampu hias. Misalnya pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 17,864,484,847 meningkat menjadi Rp. 19,736,631,310 pada tahun 2009. Hal ini diikuti juga dengan peningkatan total jumlah lampu penerangan jalan, pada tahun 2008 722 menjadi 788 pada tahun 2009.

d. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Kwh Penerangan Jalan mempunyai hubungan yang negatif. Yang berarti bila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka KWH Penerangan Jalan mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui bahwa besarnya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan yaitu sebesar $(r) = -0,27$ artinya hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan negatif yang lemah.

Melihat hasil analisa koefisien korelasi yang negatif yang lemah, maka untuk melihat keeratan hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH Penerangan Jalan dilakukan uji

signifikansi diantara kedua variabel. Dari uji signifikansi ini diketahui bahwa angka probabilitas sebesar 0,446 yang $>$ dari level of signifikansi yaitu 0,01 maka H_0 diterima. Hal ini berarti besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak mempunyai hubungan dengan besarnya KWH Penerangan Jalan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 mempunyai rata-rata kontribusi sebesar 16,177%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2001 sebesar 19,31% sedangkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 12,22%.

2. Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Penerangan Jalan Umum dari tahun 2000 sampai tahun 2009.

- a) Terdapat hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Penerangan Jalan. Hubungan ini bersifat positif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan

maka Jumlah Penerangan Jalan juga mengalami kenaikan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,987 yang berarti hubungan kedua variabel kuat. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas 0,000 yang $<$ dari 0,01 maka H_0 ditolak.

- b) Ada hubungan antara Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum. Hubungan ini bersifat positif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum juga mengalami kenaikan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,981 yang berarti hubungan kedua variabel kuat. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas 0,000 yang $<$ dari 0,01 maka H_0 ditolak.
- c) Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias bersifat positif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka Jumlah Lampu Hias juga mengalami kenaikan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,975 yang berarti hubungan kedua variabel kuat. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas 0,000 yang $<$ dari 0,01 maka H_0 ditolak.

d) Hubungan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan KWH
Penerangan Jalan mempunyai hubungan yang negatif, yang artinya apabila Penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan maka KWH Penerangan Jalan mengalami penurunan. Hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar -0,27 yang berarti hubungan kedua variabel lemah. Hasil uji signifikansi dengan angka probabilitas 0,446 yang $>$ dari 0,01 maka H_0 diterima. Hal ini berarti Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak mempunyai hubungan terhadap Jumlah Penerangan Jalan.

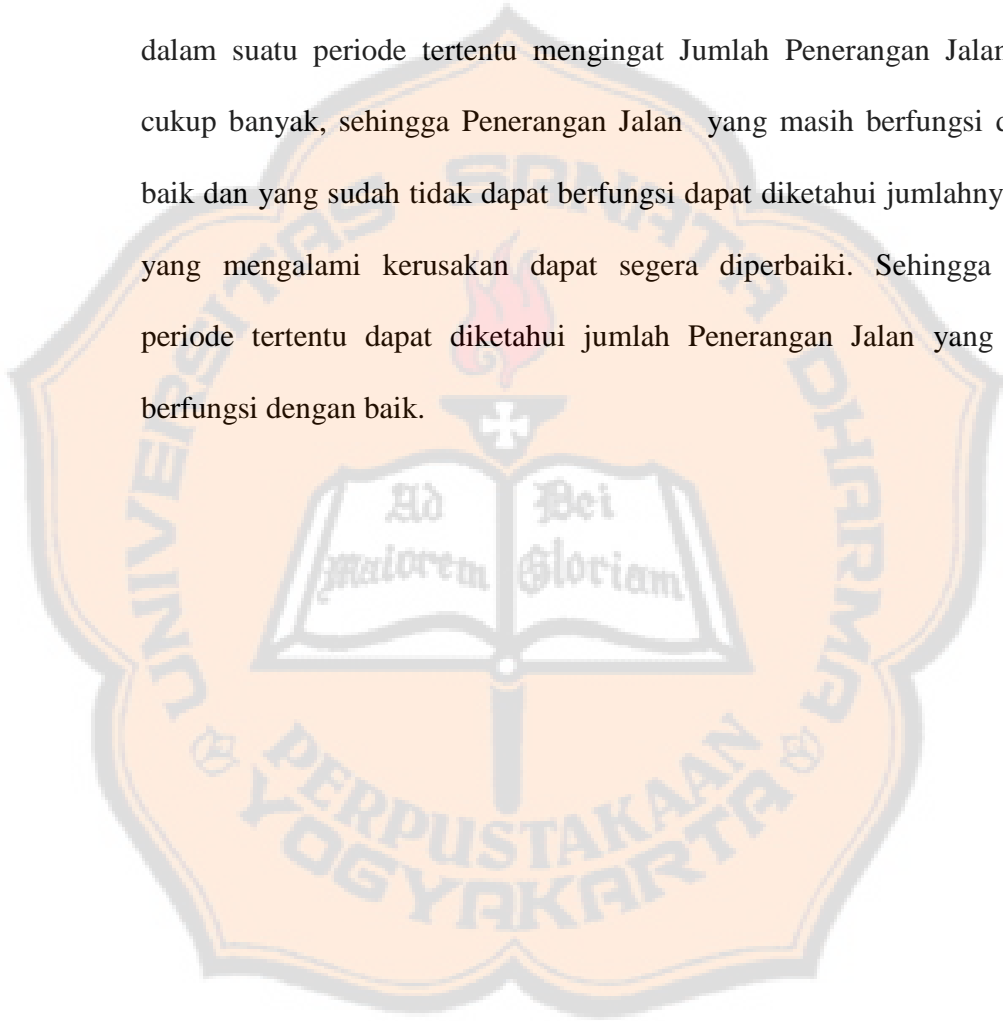
B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, penulis hanya mengambil data tahun 2000 sampai tahun 2009
2. Dalam Penelitian ini penulis hanya membahas Pajak Penerangan Jalan saja sehingga tidak membahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebaiknya penelitian yang dilakukan rentang waktunya lebih lama dan sampel lebih banyak
2. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah sebaiknya melakukan pengawasan dalam suatu periode tertentu mengingat Jumlah Penerangan Jalan yang cukup banyak, sehingga Penerangan Jalan yang masih berfungsi dengan baik dan yang sudah tidak dapat berfungsi dapat diketahui jumlahnya serta yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki. Sehingga setiap periode tertentu dapat diketahui jumlah Penerangan Jalan yang masih berfungsi dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Boedijoewono, Noegroho. 2007. *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Purwanto, S.K dan Suharyadi. 2004. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung: Citra Umbara
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Makara Sosial Humaniora: Vol VII. No. 2, hal 49-57
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistika Nonparametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sasmira, Yeni. 2007. *Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Riau*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suhartono, Sylvester. 2004. *Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Dana Penerangan Jalan Umum*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Wulansari, Aprilia. 2008. *Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2000-2009

TAHUN	REALISASI
2000	2,777,044,366
2001	7,793,350,928
2002	10,364,342,556
2003	11,809,188,645
2004	14,176,664,924
2005	15,159,696,951
2006	16,882,280,805
2007	18,885,554,284
2008	17,864,484,847
2009	19,736,631,310

Tabel Jumlah Penerangan Jalan

TAHUN	Penerangan Jalan Umum			
	Total PJU	LPJU	Lampu Hias	KWH
2000	6,418	6,418	0	11,440,414
2001	6,418	6,418	0	10,523,411
2002	7,734	7,734	0	9,125,810
2003	7,984	7,734	250	7,101,336
2004	13,233	12,983	250	9,164,761
2005	13,715	13,465	250	9,691,902
2006	15,151	14,716	435	8,713,694
2007	17,378	16,645	733	9,084,299
2008	18,722	18,000	722	10,353,533
2009	19,218	18,430	788	9,742,733

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Total Jumlah Penerangan Jalan

Correlations			PPJ	Total
Spearman's rho	PPJ	Correlation Coefficient	1.000	.985**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	10	10
	Total	Correlation Coefficient	.985**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Penerangan Jalan

Correlations			PPJ	LPJU
Spearman's rho	PPJ	Correlation Coefficient	1.000	.982**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	10	10
	LPJU	Correlation Coefficient	.982**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Jumlah Lampu Hias

Correlations			PPJ	Hias
Spearman's rho	PPJ	Correlation Coefficient	1.000	.972**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	10	10
	Hias	Correlation Coefficient	.972**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Signifikansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Kwh Lampu Penerangan Jalan

Correlations			PPJ	KWH
Spearman's rho	PPJ	Correlation Coefficient	1.000	-.273
		Sig. (2-tailed)	.	.446
		N	10	10
	KWH	Correlation Coefficient	-.273	1.000
		Sig. (2-tailed)	.446	.
		N	10	10



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Semar No. 56 Yogyakarta 55136 Telephone 514436, 515885, 515886, 562362
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0822
1960/34

Membaca Surat : Dari Kaprodi. AKuntansi - USD Yogyakarta
Nomor : 31/Kaprodi Akt/799/III/2011 Tanggal : 18/03/2011
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : CERRY NO MHS / NIM : 072114066
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta
Penanggungjawab : Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN JUMLAH PENERANGAN JALAN (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/03/2011 Sampai 28/06/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

CERRY

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28-3-2011
Kepala Dinas Perizinan



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yk.
4. Ka. Bag. P3ADK Setda Kota Yogyakarta
5. Kaprodi. AKuntansi - USD Yogyakarta
6. Ybs.

KEGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERP

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapakah jumlah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Yogyakarta selama tahun 2000 sampai dengan 2010? ✓
2. Berapakah jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta selama tahun 2000 sampai dengan 2010?
3. Berapakah tagihan listrik pertahun yang dibayarkan Pemerintah Kota kepada PT.PLN dari tahun 2000 sampai dengan 2010? ✓
4. Sebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di kota Yogyakarta?

Jawa Untuk Senin 4 April 2011.

Am.

1/4 9

1. 197 - 910. 921. 644, -
2. 496. 984. 716 - 305. - (Pajak Daerah)
3. 56. 145. 873. 231, - (2003 s/d 2010)
4.
 1. Pajak Daerah
 2. Restribusi Daerah
 3. Pendapatan Lain-Lain
 4. Bagi Hasil Pajak

C-11A

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

NO.	URAIAN	PENERIMAAN		NO.	URAIAN	PENGELUARAN	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDAPATAN			II.	BELANJA		
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	17.249.920.280,00	21.474.332.743,67	A.	RUTIN	54.931.729.301,00	55.700.173.835,44
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri :	20.657.046.215,00	22.452.952.250,89	1.	Belanja Pegawai.	40.525.188.673,00	35.546.327.280,00
a.	Pajak Daerah.	10.491.607.385,00	12.025.309.377,00	2.	Belanja Barang.	10.073.180.185,00	9.512.730.344,00
b.	Retribusi Daerah.	6.930.753.585,00	7.126.575.820,04	3.	Belanja Pemeliharaan	3.463.025.200,00	3.334.603.585,00
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	1.938.189.700,00	1.926.370.396,85	4.	Belanja Perjalanan Dinas.	234.263.000,00	176.157.600,00
d.	Lain-lain Pendapatan.	1.296.495.545,00	1.374.695.657,00	5.	Belanja Lain-lain.	4.842.106.775,00	4.718.934.954,75
3.	Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi	60.139.672.950,00	60.548.896.821,27	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga.	1.297.638.638,00	1.297.638.616,69
a.	Bagi Hasil Pajak.	6.150.731.855,00	11.300.550.259,27	7.	Grantan Subsidi/Sumbangan	519.816.225,00	519.816.225,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	375.000.000,00	990.387.750,00	8.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain.	960.857.461,00	570.793.730,00
c.	Subsidi Daerah Otomatis	40.138.262.095,00	35.022.636.942,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	3.015.653.144,00	23.171.500,00
d.	Bantuan Pembangunan	13.475.679.000,00	13.235.321.870,00				
e.	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00				

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 22 APRIL 2002

C - I/A

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2001**

NO.	URAIAN	JUMLAH		NO.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDAPATAN			II.	BELANJA		
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	19.183.584.331,26	19.183.584.331,26	A.	RUTIN	186.335.774.000,00	175.960.709.677,39
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri :	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43	1.	Belanja Pegawai.	140.821.096.109,00	142.335.453.916,90
a.	Pajak Daerah	17.814.447.519,50	22.886.374.632,50	2.	Belanja Barang.	23.260.338.407,00	21.595.467.694,00
b.	Retribusi Daerah	11.503.842.081,00	11.773.895.343,16	3.	Belanja Pemeliharaan	5.861.979.439,00	5.641.966.729,00
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	2.249.570.045,51	2.249.570.025,31	4.	Belanja Perjalanan Dinas.	2.865.320.373,00	2.672.404.600,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.557.598.952,73	3.442.752.889,46	5.	Angsuran Hutang dan Bunga	2.374.053.178,00	2.312.394.074,49
3.	DANA PERJMBANGAN	153.014.249.000,00	167.269.506.353,29	6.	Pensiun dan Onderstand.	0,00	0,00
a.	Bagi Hasil Pajak.	17.872.784.000,00	32.634.378.613,29	7.	Bantuan Keuangan (Ganjaran)	662.900.510,00	662.900.510,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	1.220.000.000,00	483.655.406,00	8.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain.	816.587.500,00	632.461.153,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU).	113.438.727.000,00	113.437.221.225,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	9.674.498.484,00	107.661.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	20.482.738.000,00	20.714.251.109,00				
e.	Dana Darurat.	0,00	0,00				

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2003
TANGGAL : 29 Maret 2003

C - I/A

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002

NO.	PENDAPATAN	J U M L A H		NO.	B E L A N J A	J U M L A H	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	34.595.208.955,59	35.596.366.520,59	1.	RUTIN	249.283.379.386,00	190.827.224.760,01
				a.	Belanja Pegawai.	167.594.997.525,00	135.393.683.816,00
				b.	Belanja Barang.	30.236.812.172,00	27.899.625.010,00
				c.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	8.431.708.772,00	8.147.911.969,00
				d.	Belanja Perjalanan Dinas.	2.389.148.210,00	2.110.625.725,00
				e.	Belanja Lain-lain	14.055.456.539,00	12.977.997.388,25
				f.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	2.228.011.389,00	2.223.800.069,76
				g.	Bagian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
				h.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain.	1.652.065.503,00	1.577.798.332,00
				i.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	22.695.179.276,00	495.782.450,00
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89				
a.	Pajak Daerah.	27.107.396.233,00	30.517.591.845,50				
b.	Retribusi Daerah.	13.991.791.110,00	14.193.457.159,11				
c.	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.509.234.852,65	2.509.234.852,65				
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.076.891.214,52	9.157.175.541,63				
3.	DANA PERIMBANGAN	185.333.797.889,24	187.968.763.862,24				
a.	Bagi Hasil Pajak.	21.985.125.317,00	24.744.094.790,00				
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	808.672.572,24	350.156.572,24				
c.	Dana Alokasi Umum (DAU).	162.540.000.000,00	162.874.512.500,00				
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	0,00	0,00				
e.	Dana Darurat.	0,00	0,00				

I
RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 56.822.010.000,00	Rp 68.621.564.311,07	120,77
1.1.1	Pajak Daerah	32.068.358.000,00	Rp 33.526.514.267,53	104,55
1.1.2	Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	Rp 16.093.220.398,50	102,38
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	2.509.235.000,00	Rp 4.081.649.388,86	162,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6.525.832.000,00	Rp 14.920.180.256,18	228,63
1.2	Dana Perimbangan	Rp 238.756.313.000,00	Rp 253.512.731.343,07	106,18
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.458.673.000,00	Rp 32.300.731.328,00	126,88
1.2.2	Dana Alokasi Umum	196.100.000.000,00	Rp 196.100.000.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.200.000.000,00	Rp 4.200.000.000,00	100,00
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.997.640.000,00	Rp 20.912.000.015,07	160,89
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
1.3.1.02	Santunan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 303.420.033.000,00	Rp 338.630.761.654,14	111,60

I

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 70.412.081.000,00	Rp 79.911.419.100,82	113,49
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 38.149.900.000,00	Rp 40.581.980.256,00	106,38
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 18.269.452.000,00	Rp 18.995.046.383,00	103,97
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.188.903.000,00	Rp 5.285.786.650,47	101,87
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 8.803.826.000,00	Rp 15.048.605.811,35	170,93
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 252.390.201.000,00	Rp 269.967.630.200,69	106,96
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 29.583.201.000,00	Rp 37.889.440.614,00	128,08
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 197.787.000.000,00	Rp 197.787.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 19.520.000.000,00	Rp 28.791.189.586,69	147,50
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 18.342.100.000,00	Rp 19.770.829.733,00	107,79
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp 5.043.100.000,00	Rp 6.471.829.733,00	128,33
1. 3 1 03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 13.299.000.000,00	Rp 13.299.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 341.144.382.000,00	Rp 369.649.879.034,51	108,36

I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 84.335.352.000,00	Rp 89.196.416.784,70	105,76
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 43.365.000.000,00	Rp 46.106.723.374,00	106,32
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 23.122.648.000,00	Rp 22.797.438.571,50	98,59
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.651.516.000,00	Rp 6.651.534.800,72	100,00
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.196.188.000,00	Rp 13.640.720.038,48	121,83
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 268.347.705.000,00	Rp 289.257.620.761,54	107,79
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 32.791.705.000,00	Rp 39.446.429.477,00	120,29
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 201.231.000.000,00	Rp 201.231.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6.600.000.000,00	Rp 6.600.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 27.725.000.000,00	Rp 41.980.191.284,54	151,42
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 15.543.000.000,00	Rp 13.432.864.500,00	86,42
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03.	Dana penyesuain Ad Hoc	Rp 11.943.000.000,00	Rp 11.943.000.000,00	100,00
1. 3 1 04.	Hibah	Rp 3.600.000.000,00	Rp 1.489.864.500,00	41,39
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 368.226.057.000,00	Rp 391.886.902.046,24	106,43

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006
(AUDITED)**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 95.257.494.000,00	Rp 96.419.456.304,52	101,22
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 42.678.850.000,00	Rp 43.997.150.025,00	103,09
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 25.028.663.530,00	Rp 24.704.781.396,00	98,71
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.885.906.000,00	Rp 7.722.505.202,62	112,15
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 20.664.074.470,00	Rp 19.995.019.680,90	96,76
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 403.865.122.259,00	Rp 397.150.853.946,12	98,34
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 28.890.203.091,00	Rp 40.145.140.985,00	138,96
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 316.832.000.000,00	Rp 316.832.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 4.800.000.000,00	Rp 4.800.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 53.342.919.168,00	Rp 35.373.712.961,12	66,31
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 26.202.353.000,00	Rp 25.451.927.071,00	97,14
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03.	Dana penyesuain Ad Hoc	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	100,00
1. 3 1 04.	Hibah	Rp 11.202.353.000,00	Rp 10.451.927.071,00	93,30
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 525.324.969.259,00	Rp 519.022.237.321,64	98,80

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 September 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	595.089.751.971	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.162.882.000	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31	109,54
1 1 1	Pajak Daerah	49.274.000.000	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18
1 1 2	Retribusi Daerah	29.092.692.000	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.996.685.000	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	442.088.480.671	442.076.980.938,00	(11.499.733,00)	100,00
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442.088.480.671	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)	94,24
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553.060.454	486.664.434,00	(66.396.020,00)	87,99
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000	365.042.000.000,00		100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000	26.788.000.000,00		100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48.838.389.300	59.473.520.600,00	10.635.131.300,00	121,78
1 3 1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Pendapatan lainnya	43.849.620.300	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00	121,29
2	BELANJA	683.281.388.075	569.120.372.561,96	(114.161.015.513,04)	83,29
2 1	BELANJA OPERASI	559.068.622.838	476.583.025.119,55	(82.485.597.718,45)	85,25
2 1 1	Belanja Pegawai	392.723.577.238	332.205.140.033,00	(60.518.437.205,00)	84,59
2 1 2	Belanja Barang	102.454.936.051	85.667.260.473,00	(16.787.675.578,00)	83,61
2 1 3	Belanja Bunga	707.120.555	707.120.553,55	(1,45)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi	307.192.000	306.876.000,00	(316.000,00)	99,90
2 1 5	Belanja Hibah	-	-	-	-
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994	57.696.628.060,00	(5.179.168.934,00)	91,76
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2 2	BELANJA MODAL	100.665.794.491	89.982.396.168,00	(10.683.398.323,00)	89,39
2 2 1	Belanja Tanah	4.435.310.000	4.092.326.400,00	(342.983.600,00)	92,27
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.413.938.825	11.067.578.735,00	(1.346.360.090,00)	89,15
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.117.570.922	50.951.282.032,00	(8.166.288.890,00)	86,19
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.991.214.744	22.307.082.701,00	(684.132.043,00)	97,02
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.387.060.000	1.252.832.300,00	(134.227.700,00)	90,32
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	320.700.000	311.294.000,00	(9.406.000,00)	97,07
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.546.970.746	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
2 4	TRANSFER				
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota				
	Surplus/(Defisit)	(88.191.636.104)	46.528.479.918,35	134.720.116.022,35	(52,76)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	696.352.512.005	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.895.236.051	132.431.571.514,72	15.536.335.463,72	113,29
1 1 1	Pajak Daerah	59.343.591.000,00	62.452.770.490,00	3.109.179.490,00	105,24
1 1 2	Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	34.940.602.210,00	2.055.374.456,00	106,25
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.454.823.854,00	8.454.823.854,45	0,45	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	26.583.374.960,27	10.371.781.517,27	163,98
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	501.554.429.866	509.881.382.862,00	8.326.952.996,00	101,66
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	499.050.133.866	504.741.154.863,00	5.091.020.997,00	101,02
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	55.803.964.505	61.081.198.662,00	5.277.234.157,00	109,46
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350.939.361	164.724.201,00	(186.215.160,00)	46,94
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000	411.257.232.000,00	2.000,00	100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000	32.238.000.000,00		100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus				
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	77.902.846.088	77.939.978.971,00	37.132.883,00	100,05
1 3 1	Pendapatan Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00		100,00
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	925.274.588,00	962.407.471,00	37.132.883,00	
1 3 3	Pendapatan lainnya	56.645.511.500,00	56.645.511.500,00		100,00
	Jumlah Pendapatan	696.352.512.005	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43
2	BELANJA	815.369.220.042	698.566.664.120,78	(116.802.555.921,22)	85,67
2 1	BELANJA OPERASI	678.223.028.699	591.219.774.234,78	(87.003.254.464,22)	87,17
2 1 1	Belanja Pegawai	484.182.361.180	428.171.470.769,60	(56.010.890.410,40)	88,43
2 1 2	Belanja Barang	109.285.272.225	90.700.730.390,14	(18.584.541.834,86)	82,99
2 1 3	Belanja Bunga	579.027.700,00	579.027.616,04	(83,96)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi				
2 1 5	Belanja Hibah	28.216.140.900,00	22.180.860.900,00	(6.035.280.000,00)	
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	55.960.226.694,00	49.587.684.559,00	(6.372.542.135,00)	88,61
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan				
2 2	BELANJA MODAL	117.948.989.549,00	107.286.061.886,00	(10.662.927.663,00)	90,96
2 2 1	Belanja Tanah	8.017.621.000	6.208.586.469,00	(1.809.034.531,00)	77,44
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.706.454.156	17.216.376.442,00	(1.490.077.714,00)	92,03
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	60.851.258.150	54.477.308.400,00	(6.373.949.750,00)	89,53
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.988.318.243	28.135.315.700,00	(853.002.543,00)	97,06
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.638.000	998.186.175,00	(79.451.825,00)	92,63
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	307.700.000	250.288.700,00	(57.411.300,00)	81,34
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.197.201.794	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	19.197.201.794	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32
2 4	TRANSFER				
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota				
	Jumlah Belanja	815.369.220.042	698.566.664.120,78	(116.802.555.921,22)	85,67
	Surplus/(Defisit)	(119.016.708.037)	21.686.269.226,94	140.702.977.263,94	(18,22)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2009

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.291,95	102,90
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.446.398.106,00	161.473.838.209,95	16.027.440.103,95	111,02
1 1 1	Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29
1 1 2	Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11
1 2	DANA PERIMBANGAN	522.128.489.869,00	517.366.876.957,00	(4.761.612.912,00)	99,09
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71.292.159.869,00	66.530.546.957,00	(4.761.612.912,00)	93,32
1 2 2	Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.245.892.100,00	71.148.301.200,00	9.902.409.100,00	116,17
1 3 1	Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1.165,62
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.291,95	102,90
2	BELANJA DAERAH	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509.884.774.585,00	474.846.213.225,86	(35.038.561.359,14)	93,13
2 1 1	Belanja Pegawai	399.664.500.318,00	380.394.869.904,00	(19.269.630.414,00)	95,18
2 1 2	Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61
2 2	BELANJA LANGSUNG	351.089.991.266,00	309.005.479.533,80	(42.084.511.732,20)	88,01
2 2 1	Belanja Pegawai	90.615.588.703,00	80.794.926.619,00	(9.820.662.084,00)	89,16
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28
2 2 3	Belanja Modal	94.586.338.685,00	86.735.745.635,80	(7.850.593.049,20)	91,70
	Jumlah Belanja	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04
	Surplus/(Defisit)	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	25,62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH DIPENDA KOTA YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER 2000 TAHUN ANGGARAN 2000

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			PROSEN
			BULAN INI	S/D. BULAN LALU	S/D. BULAN INI	
1.2.1.	PAJAK DAERAH	10.491.607.385,00	1.084.690.203,00	10.940.619.174,00	12.025.309.377,00	114,62
004	Pajak Hotel dan Restoran	5.659.132.100,00	858.543.250,00	6.735.769.649,00	7.594.312.899,00	134,20
005	Pajak Hiburan	670.405.585,00	68.237.031,00	711.033.839,00	779.270.870,00	116,24
006	Pajak Reklame	371.443.700,00	96.482.437,00	311.300.369,00	407.782.806,00	109,78
007	Pajak Penerangan Jalan	3.333.897.500,00		2.777.044.366,00	2.777.044.366,00	83,30
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	456.728.500,00	61.427.485,00	405.470.951,00	466.898.436,00	102,23
2.2.	RETRIBUSI DAERAH	1.049.062.100,00	106.363.440,00	985.281.570,00	1.091.645.010,00	104,06
005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	396.870.350,00	41.238.250,00	373.074.900,00	414.313.150,00	104,40
014	Stasiun Bis	591.441.750,00	64.489.190,00	542.303.270,00	606.792.460,00	102,60
a.	1. Retribusi Terminal Bis Umum	146.602.500,00	15.995.700,00	126.376.800,00	142.372.500,00	97,11
	2. Retribusi Terminal Bis Kota	147.015.000,00	15.430.500,00	140.010.000,00	155.440.500,00	105,73
	3. Bea Masuk Halaman Terminal	10.625.000,00	1.920.900,00	15.281.900,00	17.202.800,00	161,91
	a. Kendaraan roda 4	UP.				
	b. Andong, Becak	UP.				
	c. Kendaraan Roda 2/4	8.325.000,00	1.677.100,00	13.200.400,00	14.877.500,00	178,71
	d. Penjaja	2.300.000,00	243.800,00	2.081.500,00	2.325.300,00	101,10
	4. Lain-lain	246.274.250,00	27.026.490,00	225.569.520,00	252.596.010,00	102,57
	a. Sewa Loket Penj.	24.264.000,00	3.275.000,00	27.187.000,00	30.462.000,00	125,54
	b. Tempat WC/KM	217.340.750,00	23.125.240,00	194.400.520,00	217.525.760,00	100,09
	c. Kendaraan Menginap	4.669.500,00	390.000,00	3.128.000,00	3.518.000,00	75,34
	d. Bea Balik Nama Kios		127.750,00		127.750,00	
	d. Sewa Lahan parkir		108.500,00	854.000,00	962.500,00	
	5. Sewa Petak Kios/Retribusi Kios	15.925.000,00	1.572.400,00	13.674.450,00	15.246.850,00	95,74
b.	TPR Non Bis Angkutan Kota	25.000.000,00	2.543.200,00	21.390.600,00	23.933.800,00	95,74
015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00	606.000,00	69.156.400,00	69.762.400,00	116,27
017	Ret Temp Penginapan/Pesanggrahan/Villa	750.000,00	30.000,00	747.000,00	777.000,00	103,60
1.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN	62.487.800,00	8.144.000,00	59.379.234,00	67.523.234,00	108,06
012	Sewa Gedung Yogya Dan Senopati	36.000.000,00	4.000.000,00	32.000.000,00	36.000.000,00	100,00
014	Pendapatan Lain-lain	26.487.800,00	4.144.000,00	27.379.234,00	31.523.234,00	119,01
	- Ganti Ongkos Cetak Karcis Bioskop	3.521.000,00	324.100,00	3.082.800,00	3.406.900,00	96,76
	- Ganti Ongkos Cetak Karcis Parkir	22.966.800,00	3.819.900,00	24.053.400,00	27.873.300,00	121,36
	- Tunggakan Retribusi Reklame			54.000,00	54.000,00	
	- Titipan Kendaraan			189.034,00	189.034,00	
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	6.150.731.855,00	3.615.288.334,84	7.685.261.924,46	11.300.550.259,30	183,73
001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.664.731.855,00	2.381.747.713,00	4.947.607.632,00	7.329.355.345,00	157,12
002	B P H T B	1.036.000.000,00	527.918.794,00	2.320.599.809,00	2.848.518.603,00	274,95
003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	705.621.827,84	417.054.483,46	1.122.676.311,30	249,48
	JUMLAH	17.753.889.140,00	4.814.485.977,84	19.670.541.902,46	24.485.027.880,30	137,91

D:\DPD-00\DPD00-12.WK1
Model DPD II 64

YOGYAKARTA, 10 JANUARI 2001
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA




Kadaroeman
NIP. 490 017 532

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 YANG DIKELOLA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 BULAN DESEMBER 2001 TAHUN ANGGARAN 2001

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi penerimaan			Prosen
			Bulan ini	S.d Bulan lalu	S.d Bulan ini	
1.2.1.	Pajak Daerah	17.814.447.519,50	2.258.787.655,00	20.627.586.977,50	22.886.374.632,50	128,47
004	Pajak Hotel dan Restoran	10.850.000.000,00	968.950.102,00	11.276.292.343,00	12.245.242.445,00	112,86
005	Pajak Hiburan	1.081.492.719,50	70.642.130,00	1.205.161.239,50	1.275.803.369,50	117,97
006	Pajak Reklame	496.248.500,00	49.842.626,00	811.591.759,00	861.434.385,00	173,59
007	Pajak Penerangan Jalan	4.800.000.000,00	1.072.484.790,00	6.720.866.138,00	7.793.350.928,00	162,36
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	586.706.500,00	96.868.007,00	613.675.498,00	710.543.505,00	121,11
2.4.014	Pendapatan Lain-lain	3.586.800,00	178.500,00	3.372.660,00	3.551.160,00	99,01
	- Ganti Ongkos Cetak Karcis Bioskop	3.586.800,00	178.500,00	3.203.900,00	3.382.400,00	
	- Titipan Kendaraan			168.760,00	168.760,00	
3.1	Bagi Hasil Pajak	12.054.312.000,00	2.213.764.561,00	15.298.890.552,29	17.512.655.113,29	145,28
001	Pajak Bumi dan Bangunan	7.107.348.000,00	1.460.310.707,00	8.766.310.436,00	10.226.621.143,00	143,88
002	B P H T B	3.446.464.000,00	753.453.854,00	5.255.050.320,00	6.008.504.174,00	174,34
300	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00		1.277.529.796,29	1.277.529.796,29	85,17
	Jumlah	29.872.346.319,50	4.472.730.716,00	35.929.850.189,79	40.402.580.905,79	135,25

odel DPD II 64

Yogyakarta, 9 Januari 2002
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah
 Kota Yogyakarta

 Drs. Joko Susanto
 NIP. 490 019 883

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER 2002

Ayat	Uraian	Anggaran	Realisasi penerimaan			Prosen
			Bulan ini	S.d Bulan lalu	S.d Bulan ini	
2.1	Pajak Daerah	27.107.396.233,00	1.290.219.728,00	29.229.441.795,00	30.519.661.523,00	112,59
004	Pajak Hotel dan Restoran	13.930.987.900,00	1.030.645.011,00	15.011.323.341,00	16.041.968.352,00	115,15
	a. Hotel dan Penginapan	9.252.697.399,00	568.826.857,00	10.341.945.531,00	10.910.772.388,00	117,92
	- Murni	9.230.000.000,00	568.497.157,00	10.307.393.642,00	10.875.890.799,00	117,83
	- Tunggakan	22.697.399,00	329.700,00	34.551.889,00	34.881.589,00	153,68
	- Denda					
	b. Rumah Makan / Warung Makan	4.612.641.481,00	455.218.904,00	4.595.569.860,00	5.050.788.764,00	109,50
	- Murni	4.605.086.981,00	454.742.908,00	4.585.338.662,00	5.040.081.570,00	109,45
	- Tunggakan	7.554.500,00	475.996,00	10.231.198,00	10.707.194,00	141,73
	- Denda					
	c. Pedagang Kaki Lima	63.623.520,00	6.599.250,00	71.782.450,00	78.381.700,00	123,20
	d. Sekaten	2.025.500,00	-	2.025.500,00	2.025.500,00	100,00
005	Pajak Hiburan	1.577.203.448,00	121.092.297,00	1.553.490.199,00	1.674.582.496,00	106,17
	- Gedung Bioskop	153.348.475,00	3.810.000,00	154.172.197,00	157.982.197,00	103,02
	- Kebun Binatang Gembira Loka	196.475.312,00	50.918.760,00	171.502.098,00	222.420.858,00	113,21
	- Lain-lain Pertunjukan	1.086.979.661,00	66.323.727,00	1.085.269.489,00	1.151.593.216,00	105,94
	- Tunggakan	25.400.000,00	39.810,00	26.797.675,00	26.837.485,00	105,66
	- Sekaten	115.000.000,00	-	115.748.740,00	115.748.740,00	100,65
006	Pajak Reklame	1.713.542.785,00	138.022.593,00	1.669.282.284,00	1.807.304.877,00	105,47
	- Pajak Reklame	1.700.000.000,00	138.022.593,00	1.645.658.937,00	1.783.681.530,00	104,92
	- Tunggakan	11.542.785,00		20.533.347,00	20.533.347,00	177,89
	- Sekaten	2.000.000,00		3.090.000,00	3.090.000,00	154,50
007	Pajak Penerangan Jalan	9.294.665.100,00	-	10.364.342.556,00	10.364.342.556,00	111,51
009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	590.997.000,00	459.827,00	631.003.415,00	631.463.242,00	106,85
4.014	Pendapatan Lain-lain	7.026.800,00	180.000,00	8.553.500,00	8.733.500,00	124,29
	- Ganti Ongkos Cetak Karcis Bioskop	7.026.800,00	180.000,00	8.553.500,00	8.733.500,00	124,29
31	Bagi Hasil Pajak	15.485.125.317,00	1.757.409.266,00	14.671.304.750,00	16.428.714.016,00	106,09
	Pajak Bumi dan Bangunan	10.226.621.143,00	939.915.331,00	9.996.615.809,00	10.936.531.140,00	106,94
002	B P H T B	5.258.504.174,00	817.493.935,00	4.674.688.941,00	5.492.182.876,00	104,44
	Jumlah	42.599.548.350,00	3.047.808.994,00	43.909.300.045,00	46.957.109.039,00	110,23

Yogyakarta, 6 Januari 2003

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Kota Yogyakarta

Drs. Tri Dyoko Susanto

NIP. 490.019.883

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tahun 2006			Tahun 2005			Tahun 2004			Tahun 2003		
Angaran	Realisai	%	Angaran	Realisai	%	Angaran	Realisai	%	Angaran	Realisai	%
42,678,850,000	43,997,150,025	103.09	43,365,000,000	46,106,723,374	106.32	38,149,900,000	40,581,980,256	106.38	32,068,358,000	33,526,514,267	104.55
16,500,000,000	14,575,296,725	88.34	15,907,500,000	17,994,725,877	113.12	14,228,000,000	14,408,220,726	101.27	11,849,490,000	11,859,150,595	100.08
8,500,000,000	8,635,810,286	101.60	9,342,500,000	8,532,492,716	91.33	7,272,000,000	7,815,853,688	108.03	5,011,661,000	5,928,675,731	118.30
1,289,000,000	1,352,354,424	104.92	1,678,000,000	1,700,213,896	101.32	1,846,900,000	1,895,152,532	102.61	1,782,600,000	1,847,957,728	103.67
2,369,850,000	2,224,859,637	93.88	2,257,000,000	2,437,630,464	108.00	1,820,000,000	1,992,190,299	109.46	1,661,739,000	1,861,620,901	112.03
13,750,000,000	16,882,280,805	122.78	13,900,000,000	15,159,696,951	109.06	12,733,000,000	14,176,664,924	111.34	11,652,868,000	11,809,188,645	101.34
270,000,000	326,548,148	120.94	280,000,000	281,963,470	100.70	250,000,000	213,898,087	101.56	110,000,000	219,920,667	199.93
11,000,000	7,927,500	72.07	11,000,000	11,147,500	101.34	5,400,000	9,352,000	173.19	4,800,000	8,820,000	183.75
20,550,000,000	32,103,903,625	156.22	24,550,000,000	30,505,632,717	124.26	18,341,496,000	29,503,262,982	160.86	17,800,000,000	20,520,357,831	115.28
12,000,000,000	21,657,824,742	180.48	16,000,000,000	19,229,064,927	120.18	12,541,496,000	16,980,061,288	135.39	12,541,496,000	13,488,889,379	107.55
8,550,000,000	10,446,078,883	122.18	8,550,000,000	11,276,567,790	131.89	5,800,000,000	12,513,201,694	215.92	5,258,504,000	7,031,468,452	133.72
63,239,850,000	76,108,981,150	120.35	67,926,000,000	76,623,503,591	112.80	56,496,796,000	70,094,595,238	124.07	49,873,158,000	54,055,937,660	108.39

Yogyakarta, Juni 2010

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Kota Yogyakarta

Dra.Rr Titik Sulastri

NIP. 490 026 222

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2003 sd 2009

Ayat	Uraian	Tahun 2009			Tahun 2008			Tahun 2007		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.20.1.2026.00.00.4.1.1	Pajak Daerah	66,969,000,000	71,832,539,011	107.29	59,343,591,000	62,450,910,706	105.24	49,274,000,000	54,782,973,892	111.18
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	30,350,000,000	30,788,901,395	101.45	24,000,000,000	26,544,641,894	110.60	17,000,000,000	20,529,610,846	120.76
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	10,500,000,000	12,002,777,974	114.31	10,500,000,000	10,615,751,146	101.10	9,250,000,000	9,638,779,880	104.20
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2,300,000,000	3,727,950,479	162.08	1,651,091,000	2,037,439,504	123.40	1,530,000,000	1,740,987,733	113.79
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	5,000,000,000	5,030,452,373	100.61	5,492,500,000	4,962,578,175	90.35	3,100,000,000	3,619,969,265	116.77
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	18,400,000,000	19,736,631,310	107.26	17,300,000,000	17,864,484,847	103.26	18,050,000,000	18,885,554,284	104.63
1.20.1.2026.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	419,000,000	565,825,480	135.04	400,000,000	426,015,140	106.50	344,000,000	368,071,884	107.00
	Biaya Penggantian Cetak Karcis Bioskop									
1.20.1.2026.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	57,515,839,869	48,478,843,969	84.29	43,033,824,630	47,906,842,878	111.32	30,600,000,000	36,872,122,219	120.50
1.20.1.2026.00.00.4.2.1.01	Pajak Bumi dan Bangunan	34,043,636,458	29,909,059,691	87.86	28,321,767,437	30,449,247,481	107.51	20,300,000,000	23,504,741,664	115.79
1.20.1.2026.00.00.4.1.0.02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	23,472,203,411	18,569,784,278	79.11	14,712,057,193	17,457,595,397	118.66	10,300,000,000	13,367,380,555	129.78
	Jumlah	124,484,839,869	120,331,382,980	96.66	102,377,415,630	110,357,753,584	107.80	79,874,000,000	91,615,096,111	114.75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RALAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010
BULAN DESEMBER 2010

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi penerimaan			Prosen
			Bulan ini	S.d Bulan lalu	S.d Bulan ini	
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	75,200,000,000	5,505,769,364	72,748,809,878	78,254,579,242	104.06
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	31,530,000,000	1,410,540,033	31,104,741,899	32,515,281,932	103.12
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 1	Pajak Restoran	12,484,000,000	951,299,634	12,361,757,520	13,313,057,154	106.64
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	4,300,000,000	307,417,538	4,338,899,703	4,646,317,241	108.05
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	5,100,000,000	582,567,832	4,056,645,976	4,639,213,808	90.96
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	21,186,000,000	2,187,691,666	20,273,490,382	22,461,182,048	106.02
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	600,000,000	66,252,661	613,274,398	679,527,059	113.25
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	57,906,261,800	9,471,666,148	45,646,726,878	55,118,393,026	95.19
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	36,232,638,092	3,484,049,406	30,058,181,568	33,542,230,974	92.57
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21,673,623,708	5,987,616,742	15,588,545,310	21,576,162,052	99.55
	Jumlah	133,106,261,800	14,977,435,512	118,395,536,756	133,372,972,268	100.20

Yogyakarta, Januari 2011
Kepala Dinas Pajak Daerah dan
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Arbak Yhoga Widodo, SE.MM
NIP. 19630303 199703 1 001